

Kantor Disperinaker 'Diserbu' Pencari Kerja

SLAWI (KR) - Pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap sektor usaha di Kabupaten Tegal. Banyak perusahaan gulung tikar dan terpaksa melakukan PHK, sehingga pengangguran meningkat. Akibatnya, banyak pengangguran mendatangi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Tegal. Mereka mencari informasi lowongan kerja dan mencari kartu kuning atau AK1.

Kepala Bidang Penempatan Kerja Disperinaker Kabupaten Tegal Widiantoro SH mengatakan, hingga Jumat (19/3) Disperinaker masih didatangi banyak pencari kerja. "Terhitung sampai bulan Februari lalu ada 1.879 pencari kerja, dengan 780 kesempatan kerja yang tersedia, Sebanyak 346 orang berhasil ditempatkan melalui program kerja lokal, antardaerah maupun antarnegara," jelasnya, Sabtu (20/3).

Tahun 2020 lalu, dari 15.189 pencari kerja, yang berhasil disalurkan 2.697 orang, karena ada 2.704 lowongan kerja. Tercatat pula, pekerja Indonesia di luar negeri yang melalui jalur legal ada 193 orang. Sementara itu, pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK) mencapai ribuan orang. "Disperinaker menjamin perlindungan optimal untuk pekerja ABK yang melalui jalur legal. Ke depan, juga ada pantauan pelaksanaan perlindungan warga yang menjadi ABK," kata Widiantoro.

Widiantoro menambahkan, selama pandemi Covid-19, Disperinaker Kabupaten Tegal melakukan beberapa terobosan untuk membuka kesempatan kerja. Di antaranya dengan cara menghubungi perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa Batam membutuhkan tenaga las untuk tenaga kerja laki-laki yang sudah terakreditasi dan punya kompetensi. "Jika calon tenaga kerja belum punya kompetensi, semua biaya pelatihan ditanggung pihak perusahaan," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Widiantoro SH, untuk memudahkan para pencari kerja, nantinya ada sistem jemput bola pada saat pembuatan kartu kuning atau AK1 sehingga tidak terjadi pembludakan masyarakat yang datang ke dinas. "Meski sudah diupayakan jemput bola, tetap saja pencari kerja datang ke kantor kami untuk mendaftar sebagai pencari kerja," tandasnya. **(Ryd)-d**

Tirakatan HUT Mungkid

MAGELANG (KR) - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Priyadi mengatakan, hari jadi Kota Mungkid ke-37 tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 22 Maret mendatang akan diselenggarakan dalam situasi yang sederhana, mengingat hingga saat ini Pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Magelang masih belum berakhir. "Nanti kegiatannya adalah malam tirakatan pada hari Minggu (21/3) malam. Akan diadakan doa bersama, itu pun juga terbatas. Acaranya di Rumah Dinas Bupati Magelang, Ruang Command Center, dan juga di Kantor Badan Dinas di luar Kompleks Pemda. Jadi tidak semuanya berkumpul. Masyarakat juga bisa mengikuti kegiatan malam tirakatan melalui Chanel Youtube," terang, Nanda saat acara press conference penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang di ruang CCR, Jumat (19/3).

Nanda berharap, masyarakat Kabupaten Magelang juga ikut berpartisipasi untuk menyaksikan kegiatan malam tirakatan, yang juga akan diisi dengan tausiyah dari ulama termama yang berasal dari Yogyakarta. "Pak Kiai, ceramahnya juga tidak hadir secara langsung ke Magelang, namun secara virtual dari kediaman beliau. Semua ini kita lakukan tidak lain untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan," jelasnya.

Sementara terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tahap III, Nanda mengatakan, sangat berdampak baik terhadap penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif di wilayah Kabupaten Magelang. "Saya kira pemberlakuan PPKM Mikro ini sangat signifikan dampaknya terhadap penurunan kasus Covid-19, bahkan tidak hanya ditingkatkan lokal kabupaten/kota tetapi juga secara nasional kasusnya juga mengalami penurunan," jelasnya. **(Bag)-d**

Bandara Sambungan hal 1

"Tepat setelah mendarat, pesawat tergelincir ke arah kanan runway sehingga runway terblokir dan tidak dapat digunakan untuk operasional penerbangan," kata Yohanes.

Petugas ATC AirNav Indonesia Cabang Halim memberikan pelayanan kedaruratan dengan berkoordinasi dengan pihak PT Angkasa Pura II dan TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma. AirNav Indonesia kemudian menerbitkan Notam untuk penutupan runway Bandara Internasional Halim Perdanakusuma dengan nomor A0693/21.

Sebagai dampak adanya penutupan runway, beberapa penerbangan yang menuju Bandara Internasional Halim Perdanakusuma dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. AirNav Indonesia akan terus berkoordinasi dengan para stakeholders untuk memberikan informasi terbaru terkait penutupan runway Bandara Internasional Halim Perdanakusuma. **(lmd)-d**

2.681 Orang Sambungan hal 1

Indonesia dapat segera mengatasi pandemi sehingga perekonomian bisa bergulir kembali dengan cepat. "Dosen yang menerima vaksinasi baru sekitar dua puluh persen. Mudah-mudahan sebelum puasa semua dosen sudah divaksin, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya.

Wakil Rektor UGM Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof Dr Ir Bambang Agus Kironoto mengatakan, untuk mempersiapkan vaksinasi massal ini, Pimpinan UGM dan Satgas Covid-19 UGM berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, Dinkes Sleman, Kominfo Sleman, RSUD Dr Sardjito, RSA UGM, GMC, serta Klinik Korpagama untuk menyiapkan tim vaksinasi.

Setelah tahapan vaksinasi kali ini, selanjutnya UGM juga akan melaksanakan vaksinasi untuk 2.142 tenaga dosen non-lansia UGM yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan vaksin, dan berikutnya untuk 5.052 tenaga kependidikan non-lansia UGM yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan vaksin dan dilakukan setelah vaksinasi dosen.

"Untuk dosen dan tenaga kependidikan non-lansia masih dikoordinasikan dengan Kemenkes RI dan Dinkes Provinsi DIY untuk mendapatkan alokasi vaksin," terang Bambang. Sementara itu, terkait rencana vaksinasi untuk kelompok lainnya seperti mahasiswa, ia mengungkapkan bahwa UGM masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait urutan prioritas penerima vaksin. **(Dev)-d**

Pemkab Sukoharjo Belum Putuskan Pembelajaran Tatap Muka

SUKOHARJO (KR) Pemkab Sukoharjo belum memutuskan kapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai. Sebab masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan tidak ingin gegabah dengan memaksakan siswa dan guru beraktivitas belajar mengajar di sekolah. Pandemi virus Korona belum berakhir dan vaksinasi virus Korona pada guru dan siswa belum jelas kapan dimulai menjadi alasan kuat.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (19/3) mengatakan, Pemkab Sukoharjo tidak ingin gegabah dan belum memutuskan kapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai. Pembelajaran sekarang masih tetap digelar pihak sekolah secara daring atau online. Sistem tersebut diterapkan untuk menghindari tatap muka di sekolah karena masih dilarang dan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Korona.

Etik Suryani juga menegaskan, Pemkab Sukoharjo tidak ingin memaksakan diri menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah. Sebab kondisi sekarang masih pandemi virus Korona. Di sisi lain, Pemkab Sukoharjo masih menerapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Korona dan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemkab Sukoharjo masih membutuhkan persiapan matang dan izin dari pemerintah pusat terkait penerapan pembelajaran tatap mu-

ka di sekolah. Salah satu persiapan yang ditunggu yakni berkaitan dengan vaksinasi virus Korona dengan sasaran tenaga pendidik atau guru dan siswa sekolah.

Program vaksinasi tersebut sampai sekarang belum jelas kapan akan dilaksanakan di Sukoharjo. Sebab Pemkab Sukoharjo sendiri juga masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat baik penyiaian kebutuhan vaksin virus Korona dan waktu pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran tenaga pendidik atau guru dan siswa. "Pemkab Sukoharjo tidak ingin gegabah dan belum memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah kapan akan mulai dilaksanakan. Sekarang masih menerapkan sistem daring atau online," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo melihat pentingnya vaksinasi virus Korona diberikan dengan sasaran tenaga pendidik atau guru dan siswa. Sebab mereka akan berinteraksi atau beraktivitas bersama di lingkungan sekolah. Bahkan kerumu-

nan massa akan terjadi karena banyaknya tenaga pendidik atau guru dan siswa bertemu atau berkumpul di sekolah. Kondisi tersebut rawan terjadi penyebaran virus Korona dan memunculkan klaster baru.

Pemkab Sukoharjo tidak ingin ada penyebaran dan terjadi peningkatan kasus positif virus Korona di lingkungan sekolah. Hal itu sangat penting dihindari mengingat kondisi di Sukoharjo masih tinggi terjadi kasus positif virus Korona. Kasus tersebut sepenuhnya belum tertangani semua dan masih ditangani oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Sukoharjo.

"Guru dan siswa belum menerima vaksin virus Korona. Mereka tetap harus jadi sasaran vaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan di sekolah. Selain itu Pemkab Sukoharjo juga menunggu izin dari pusat," lanjutnya.

Etik menambahkan, persiapan tidak kalah penting lainnya sebelum penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah yakni adanya surat izin dari wali murid. Sebab wali murid perlu dilibatkan untuk mengetahui apakah mereka memberikan izin pada anak atau siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau tidak.

"Kalau wali murid setuju tidak masalah. Tapi kalau menolak maka jadi pertimbangan penting. Apalagi

sekarang masih pandemi virus Korona," lanjutnya.

Aktivitas sekolah sekarang hanya diisi beberapa tenaga pendidik atau guru piket. Mereka masih secara bergantian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Masuknya guru tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari kontrol kegiatan dan perawatan aset rutin di sekolah. "Sekolah juga menerapkan sistem piket pada guru tetap masuk sekolah. Mereka tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat," lanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Darno mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo belum bisa memastikan kapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah di Sukoharjo akan digelar. Sebab kondisi sekarang masih pandemi virus Korona. Terlebih lagi di Sukoharjo berstatus kejadian luar biasa (KLB) virus Korona dan diterapkannya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo memilih tidak memaksakan diri dan tetap menerapkan pembelajaran online atau daring. Disisi lain, pembelajaran tatap muka di sekolah juga belum mendapat izin dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat. **(Mam)-d**

500 Warga Dusun Pengkok Terisolasi



KR-Abdul Alim

Warga dan relawan kerjabakti membersihkan longsor di Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso.

Kasi Trantib Kecamatan Jatiyoso, Suyahmin, Sabtu (20/3).

Selama akses masih tertutup longsor, lanjut Suyahmin, warga Dusun Pengkok harus berjalan kaki meniti bukit menuju Dusun Pon-

dok, baru kemudian ke Puntuksari, Wonorejo. "Jalur alternatif itu berupa jalan tanah setapak. Kendaraan bermotor roda dua juga diragukan bisa melewatinya," ungkapnya.

Menurutnya, longsor juga meng-

23 MARET HINGGA 5 APRIL Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Mikro

JAKARTA (KR) - Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), mulai 23 Maret hingga 5 April 2021. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, untuk masa perpanjangan PPKM Mikro ini wilayah pemberlakuan diperluas, dengan tambahan lima provinsi, yaitu Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Sulawesi Utara (Sulut), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditambahkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 6/2021 yang terbit pada tanggal 19 Maret 2021. "Diperluas ke lima daerah lainnya yang menurut data dari Satgas Penanganan Covid-19 maupun dari Kemenkes memerlukan atensi, yaitu Sulut, Kalsel, Kalteng, NTT, dan NTB, kemudian total 15 provinsi," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/3).

Pada periode sebelumnya, PPKM Mikro telah dilaksanakan di sepuluh provinsi, yaitu

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan evaluasi, pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah-wilayah tersebut berlangsung cukup baik dan efektif menekan laju kasus aktif Covid-19. Untuk itu, sebagai langkah memaksimalkan upaya penekanan angka kasus positif, PPKM Mikro kembali diperpanjang serta diperluas ke daerah yang memenuhi parameter persentase kasus aktif, persentase kesembuhan, persentase kematian, dan tingkat Bed Occupancy Ratio (BOR) yang telah ditetapkan.

Tito menegaskan Inmendagri 6/2021 sebagai payung hukum pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro akan disosialisasikan lebih lanjut agar berjalan lancar dalam tataran implementasi. "Selanjutnya nanti akan di-follow up, jadi Instruksi Mendagri lebih bersifat guideline yang bersifat umum, tapi dapat dikembangkan sesuai dengan tantangan daerah masing-masing," jelasnya. **(Sim)-d**

DIY Sambungan hal 1

"Ditambah lagi PR terkait stunting. Kita minta anggota mendapatkan informasi yang tepat dan tidak hanya pemberdayaan ekonomi keluarga, namun juga tentang program stunting," papar GKR Bendara.

GKR Bendara juga minta dukungan dan bimbingan tentang program-program yang bisa bersinergi bersama BKKBN, terutama program stunting.

Satpol PP Sambungan hal 1

Kasus sembuh di DIY bertambah sebanyak 100 kasus maka total sembuh mencapai 25.549 kasus. Sedangkan kasus meninggal mengalami penambahan 5 kasus, dengan demikian total kasus meninggal di DIY menjadi 753 kasus dari hasil verifikasi data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota.

"Kenaikan terkonfirmasi harian di DIY ini sebanyak 108 kasus dari hasil tracing kontak positif, 99 kasus dari periksa mandiri, 31 kasus be-

lum ada informasi riwayat penularan, 3 kasus perjalanan luar daerah dan satu kasus skrining karyawan kesehatan," katanya.

Berty menegaskan penambahan kasus terkonfirmasi positif harian masih mengalami kenaikan berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY. Sehingga masyarakat DIY tetap diminta disiplin melakukan protokol kesehatan 5 M yaitu

dan tujuan GKR Bendara. Terkait visi BKKBN menciptakan keluarga berkualitas yang tenteram, mandiri, bahagia. Bukan lagi 2 anak cukup, karena keinginan memiliki jumlah anak merupakan hak reproduksi setiap orang.

"Ya, untuk mencegah anak menjadi stunting kita bisa mulai dari ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun masih bisa diubah jadi normal. Namun kalau

Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dengan sabun, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas dengan baik dengan tren kasus terkonfirmasi masih mengalami penambahan.

"Jumlah sampel diperiksa sebanyak 703 sampel dari 662 orang di DIY. Case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan sebanyak 81,48 persen dan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat fatalitas ka-

sus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2,40 persen di DIY," jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY ini menegaskan jumlah ketersediaan Tempat Tidur (TT) di 27 Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY sudah ditambahkan mencapai 1.101 bed saat ini. Tingkat keterisian bed RS Rujukan Covid-19 mencapai 39,42 persen. **(Ria/Ira)-d**

..... Sambungan hal 1

sudah di atas 2 tahun kita hanya bisa melatihnya saja dengan keterampilan-keterampilan dan tidak bisa menyembuhkan stunting," terang Hasto.

Hasto juga meminta supaya GKR Bendara bisa membantu BKKBN bersama AKU bermitra dengan swasta di Yogya. Nantinya BKKBN bantu data stunting di DIY ada bera-

pa. **(Ati)-d**